

LAPORAN POKOK-POKOK KESIMPULAN
RAPAT PANSUS RPJMD DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Pertemuan IX – Selasa, 1 Juli 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemantapan substansi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Luwu Timur mengadakan Pertemuan IX pada Selasa, 1 Juli 2025, di Ruang Banggar DPRD Luwu Timur dengan agenda utama pembahasan Pembangunan Kawasan Ekonomi Baru (KEB) di Tarengge, Kecamatan Wotu. Kawasan ini direncanakan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi daerah guna mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan sektor tambang menuju sektor industri, perdagangan, dan jasa yang berkelanjutan.

Pembahasan ini bertujuan memastikan aspek legalitas, kesiapan tata ruang, sinkronisasi lintas OPD, penyusunan rencana pembebasan lahan, serta kejelasan operasional teknis dalam penetapan KEB Tarengge sebagai program prioritas RPJMD dengan pendekatan berbasis riset, kajian komprehensif, serta studi kelayakan agar pembangunan kawasan ini terwujud secara terukur, realistis, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

B. POKOK KESIMPULAN

1. Penetapan Kawasan Ekonomi Baru Tarengge sebagai Program Prioritas RPJMD

- KEB Tarengge menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Luwu Timur 2025–2029, mendukung transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor tambang ke sektor industri, jasa, dan perdagangan.
- Telah ditetapkan kebutuhan lahan seluas minimal 20 ha dengan sinkronisasi RTRW dan RDTR Luwu Timur sebagai dasar pengembangan.

2. Perlunya Pendekatan Riset dan Studi Kelayakan

- Pembangunan KEB Tarengge harus diawali riset mendalam, kajian sosial budaya, kajian lingkungan, serta feasibility study dengan metode mutakhir agar program berjalan sesuai kondisi riil lapangan.
- Studi komprehensif diperlukan untuk memetakan potensi, tantangan, dan risiko logis agar kawasan ini tidak menjadi proyek stagnan, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang aktif dan produktif.

3. Sinkronisasi Peran dan Porsi OPD

- Seluruh OPD terkait perlu memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam realisasi pembangunan KEB Tarengge (konsep “Siapa Mengerjakan Apa”).
- Pemda diminta memastikan penyelarasan nomenklatur program di seluruh perangkat daerah terkait agar implementasi berjalan efektif.

4. Sinkronisasi dengan PT Vale Indonesia dan Pemangku Kepentingan Lain

- Perlu diadakan pertemuan intensif dengan PT Vale Indonesia Tbk. untuk sinkronisasi program pendukung pembangunan KEB Tarengge, potensi CSR, dan kontribusi investasi bagi daerah.
- Kerja sama dengan pihak swasta perlu diarahkan untuk memperkuat dukungan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

5. Aspek Legalitas dan Pengadaan Lahan

- Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur diminta mendalami Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk aspek perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
- Pembebasan lahan menjadi prioritas tahap awal pembangunan, dengan penetapan lokasi, koordinat lahan, dan pola negosiasi yang akuntabel.

6. Kesiapan Infrastruktur dan Tata Ruang

- Dinas PUPR memastikan RDTR dan RTRW Kawasan Tarengge sinkron dengan rencana pengembangan kawasan seluas 20 ha, dengan pembagian zona SPU, SPJ, dan zona pertanian secara detail dan berjangka panjang (minimal 25–50 tahun).
- Direncanakan pembangunan terminal, rest area, dan stasiun kereta api sebagai penunjang aktivitas kawasan untuk mendukung konektivitas dan kelancaran arus barang/jasa.

7. Pemberdayaan Ekonomi dan Aktivasi UMKM

- Dinas Koperindag perlu menyusun strategi penguatan pasar Tarengge dan pemberdayaan UMKM dengan fokus pada produk-produk unggulan daerah agar kawasan ini menjadi sentra ekonomi masyarakat sekitar.
- Perlu kajian kelayakan apakah pasar Tarengge dapat diramaikan secara ekonomis, serta strategi aktivasi pasar berbasis potensi riil.

8. Komitmen Pansus dan DPRD

- Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Luwu Timur berkomitmen mengawal pembangunan KEB Tarengge sebagai amanat visi-misi Bupati dan harapan masyarakat Luwu Timur agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan perencanaan matang dan akuntabilitas tinggi.

C. PENUTUP

Melalui rapat ini, Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Baru Tarengge sebagai program prioritas yang akan diwujudkan secara bertahap dan terukur dalam RPJMD 2025–2029, dengan mengedepankan prinsip riset, kajian mendalam, kesiapan tata ruang, dan keterlibatan masyarakat lokal. Seluruh masukan dalam rapat ini akan menjadi bahan pematangan konsep, penajaman teknis, dan penetapan skema implementasi agar pembangunan Kawasan Ekonomi Baru Tarengge menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.